

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kepemimpinan merupakan suatu hal penting dalam menjalankan sebuah organisasi apalagi organisasi apalagi untuk partai politik. Kepemimpinan juga merupakan sebuah seni yang kemudian mempunyai ciri satu dengan lainnya. Sehingga masing-masing pimpinan punya ciri khas yang memang berdeda dengan pemimpin yang lain. Partai politik juga punya salah satu fungsi sebagai organisasi aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan rakyat, maka dalam hal tersebut tentu butuh sosok pemimpin atau bahkan manajemen organisasi modern yang mampu menopang kebutuhan tersebut. Disisi lain perlu disadari bahwa partai politik (Islam) hanya bergerak atau muncul pada *event* lima tahun sekali baik itu Pilpres (Pemilihan Umum Presiden), Pileg (Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif), Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) baik tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi.¹ William G. Scott (1962). Pengertian kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.² Weschler dan Massarik (1961). Pengertian kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu, dan diarahkan melalui proses komunikasi, untuk mencapai tujuan tertentu.³ Dengan pengertian tersebut

¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/4734432/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli-dan-macam-macam-gaya-memimpin?page=4> diakses pada 20/12/2024 Pukul 08.20 WIB.

² Syahril, S. (2019). Teori-teori kepemimpinan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(02), 208-215.

³ Hutahaean, W. S., & SE, M. T. (2021). *Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book.

maka kepemimpinan punya posisi penting dalam menjalankan sebuah organisasi, sehingga prinsip atau model kepemimpinan menjadi suatu hal yang vital untuk kemudian bisa mencapai visi atau misi sebuah organisasi.

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁴ Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk memperromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujuai. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.⁵

Secara umum kepemimpinan sebuah partai politik atau bahkan partai politik islam akan mencerminkan sebuah identitas partai tersebut. Tentu partai politik islam akan Bersatu dengan senyawa ideologis berupa syariat islam atau nilai islam sebagai bagian utama dalam proses organisasi. Namun hal tersebut tidak peneliti temukan dalam partai politik islam khususnya yang ada di Kabupaten Lamongan. Mereka cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dan transaksional dalam menyikapi kebijakan politik berupa persebutan dan mempertahankan kekuasaan.

⁴ Pratiwi, I., Rahayu, S., & Triyanto, T. (2020). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 130-138.

⁵ Ibid

Sehingga hampir tidak ada beda antara partai politik islam dan partai politik nasionalis lainnya. Mereka seperti mati suri ketika pemilu selesai, tidak banyak agenda dengan basis aspirasi rakyat yang mereka laksanakan, maka tak heran apabila kerja partai politik islam lebih pada proses perebutan dan mempertahankan kekuasaan dalam periode lima tahunan.

Sedangkan partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain yakni, Komunikasi Politik, Sebagai Sarana Artikulasi dan Aggregasi kepentingan, Sarana Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Sarana Pembuatan Kebijakan, Pengatur Konflik, Merumuskan Program politik dan Opini Publik.⁶ Fungsi-fungsi tersebut selayaknya menjadi pedoman bagi partai politik untuk bergerak dan berorganisasi sehingga focus partai politik tidak hanya untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan, dalam demokrasi liberal saat ini harusnya fungsi tersebut mampu dijalankan secara maksimal oleh organisasi partai politik atau bahkan kepemimpinan partai politik tersebut.

Sedangkan partai politik islam adalah suatu lembaga politik atau bahkan partai politik yang mempunyai corak ideologis islam atau menggunakan nilai-nilai islami untuk kemudian digunakan sebagai pijakan utama dalam membuat keputusan.⁷ Partai politik islam yang masih eksis di Indonesia yakni PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Partai-partai tersebut lebih diidentikan sebagai partai islam karena apunya corak ideologis islam atau bahkan cenderung islam. Adapun Partai Ummat baru beberapa tahun ini berdiri dan pada pemilu 2024 yang lalu tidak lolos *parliamentary threshold*.

Agenda rutin lima tahunan tersebut seolah menyedot seluruh perhatian yang dan daya guna partai, baik partai islam maupun partai umum. Segala tenaga, infrastruktur dikerahkan untuk bisa ikut andil dalam nuansa

⁶ Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169.

⁷ Rahmadani, N. F., & Rahmatiah, R. (2024). Peran Partai Politik di Indonesia Dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 1-3.

politik lima tahunan tersebut. Tak ayal terkadang partai politik tersebut hanya muncul pada saat momen pemilu (pemilihan umum). Disadari atau tidak terkadang masyarakat tidak sampai punya andil yang efektif terhadap proses pemilu tersebut. Bahkan untuk penentuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan sampai calon presiden masyarakat tidak punya andil sama sekali untuk melakukan penentuan. Partai Politik seolah hanya terjebak pada isu jual beli rekomendasi baik dari pusat sampai daerah.

Kepemimpinan islam menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji apabila disandingkan dengan konteks politik dan demokrasi yang saat ini sedang berkembang.⁸ Dalam konteks kepemimpinan partai politik islam secara tentu akan berguna untuk menelaah bagaimana kepemimpinan tersebut mampu digunakan secara normatif pada persoalan dan konteks politik dan demokrasi saat ini. ⁹Politik dan demokrasi yang saat ini berkembang memang tidak berasal dari islam, lebih tepatnya dari barat sehingga akan ada bentuk kepemimpinan partai politik islam yang mampu menjawab tantangan dan juga peluang dalam konteks politik dan demokrasi masa kini. Potret kepemimpinan tersebut akan menjadi referensi kepemimpinan di Indonesia yang memang mayoritas pendudukan muslim¹⁰ khususnya di Kabupaten Lamongan. Tidak kemudian hal yang berasal dari peradaban barat tidak cocok untuk digunakan dalam konteks islam saat ini. Kepemimpinan partai politik islam dalam konteks politik dan demokrasi menjadikan peluang dan tantangan tersendiri bagi umat muslim¹¹ yang ada di Indonesia secara khusus di Kabupaten Lamongan.¹²

⁸ Dewi, E. R., Hidayatullah, C., Oktaviantari, D., Raini, M. Y., & Islam, F. A. (2020). Konsep Kepemimpinan Profetik. *Al-Muaddib: Jurnal ilmu-ilmu sosial dan keislaman*, 5(1), 147-159.

⁹ Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143-160.

¹⁰ Latif, Y. (2006). *Inteligensia Muslim dan kuasa: genealogi inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20*. Mizan Pustaka.

¹¹ Ibid

¹² Kabupaten Lamongan terletak pada titik koordinat: 6°51' - 7°23' Lintang Selatan dan 112°33' - 112°34' Bujur Timur.[5] Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan diakses pada 17/05/2024 pukul 07:25

Dalam kasus yang lain seharusnya kepemimpinan partai politik apalagi partai politik islam mampu mengakomodir kepentingan rakyat atau bahkan mampu menjadikan rakyat sebagai raja utama dalam penentuan kebijakan partai. Karena dalam dimensi falsafah demokrasi maka suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga ketika hal tersebut dilaksanakan maka akan hadir nuansa politik yang demokratis walaupun tetap dalam koridor kepentingan, karena salah satu factor penentu dalam politik adalah kepentingan, selagi kepentingan sama maka semua akan jalan beringin. Maka kepentingan rakyat harusnya menjadi isu utama partai politik dalam menjalankan organisasinya. Sehingga parpol (partai politik) menjadi Lembaga yang mampu mengayomi kepentingan rakyat secara seksama.

Senyatanya partai politik tersebut hanya menjadikan rakyat sebagai objek dalam politik dan demokrasi kita hari ini. Sehingga rakyat tidak mampu memainkan peran yang sesungguhnya. Maka hal ini menjadi ironi tersendiri yang tak ayal fungsi-fungsi partai politik semisal aspirasi, pendidikan politik, advokasi dan lain sebagainya malah menjadi tugas lembaga lain semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO). Dengan kondisi yang semacam ini jelas partai politik tidak sesuai dengan jalur fungsi sebagai tempat mengadu keluh kesah bagi rakyat. Yang ada dalam benak para pemimpin partai adalah kekuasaan, untuk kemudian partai politik digunakan sebagai lembaga atau alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Memang hal tersebut tidak salah namun fungsi partai politik tidak hanya sekedar itu.

Demokrasi modern juga menjadikan partai politik semakin pragmatis dalam merebut dan mempertahankan kekuasaanya. Jelas ini terjadi baik tingkat pusat sampai di daerah tak terkecuali Kabupaten Lamongan. Demokrasi sepertinya dijadikan momentum baru untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, partai politik menjadi mesin dan motor utama dalam gerakan demokrasi tersebut. Maka sejumlah praktik tak lazim pun terjadi, isu jual beli suara adalah persoalan umum yang banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Bahkan salah satu pimpinan partai

yang peneliti temui menyatakan bahwa ideologi partai kami adalah kekuasaan. Padahal dalam AD/ART partai tersebut tidak menjelaskan demikian. Hal ini kemudian menjadi riskan adanya.

Praktik politik transaksional terjadi begitu massif dan tidak terhindarkan, hal ini juga diakui oleh para politisi yang peneliti temui. Disisi lain masyarakat juga belum memiliki Pendidikan politik yang cukup sehingga masyarakat juga punya pemikiran prakmatis dalam moment politik yang dilakukan lima tahun sekali tersebut. Ada yang bilang bahwa uang teknis tersebut digunakan sebagai pengganti uang lelah selama orang tersebut tidak berkerja dan memilih untuk menyalurkan suaranya. Dengan demikian seperti ada dua persoalan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Politisi mengakui adanya politik transaksional sedangkan masyarakat dengan pemikiran sederhana membutuhkan uang jalan untuk bisa melangkah dan menyumbangkan suara pada saat pemilu.

Dalam kontekas politik dan demokrasi maka sebuah karakter kepemimpinan yang kuat akan dibutuhkan tak terkecuali kepemimpinan dalam islam. Beberapa yang peneliti ketahui bahwa kepemimpinan partai politik islam yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk cukup pragmatis dengan maksud bahwa kepemimpinan partai politik islam (muslim) di Kabupaten Lamongan terjadi karena proses yang pragmatis pula. Hal tersebut juga diakui secara langsung oleh para petinggi partai yang peneliti temui.

Selanjutnya, politik transaksional yaitu dapat dikatakan sebagai suatu politik dagang, ada yang yang menjual, maka ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Kalau dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Hal ini berarti ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Dalam kegiatan politik transaksional tidak semata-mata hanya dibayar dengan uang, tetapi dalam beberapa kasus

politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang¹³.

Demokrasi menjadi salah satu sistem bahkan ideologi politik mainstream¹⁴ dewasa ini, sehingga banyak dampak baik positif dan negative¹⁵ yang kemudian menjadi gejala baik di masyarakat maupun pemimpin itu sendiri. Maka demokrasi tersebut tidak hanya menyajikan cita-cita dasar berupa konsep dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁶ Ada hal lain yang terjadi dengan proses demokrasi tadi tak terkecuali di Indonesia. Tentu banyak ditemui praktik atau tindakan lainnya semisal politik transaksional¹⁷ dalam demokrasi yang kita yakini sebagai sistem politik paling ideal saat ini.¹⁸

Demokrasi sejatinya memang tidak bisa dilepaskan dari proses-proses transaksi. Artinya ada pertukaran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun proses transaksi dalam demokrasi yang sehat mengambil wujud pertukaran visi misi, ideologi, program maupun platform kontestan politik dengan dukungan pemilih.¹⁹ Proses transaksional sebenarnya secara tidak langsung menelanjangi sebuah fakta bahwa pasca reformasi perwujudan demokrasi tidak dimaknai sebagai penghormatan kepada kedaulatan rakyat. Melainkan menjadi ajang dan ruang segelintir orang yang memiliki kuasa dan uang untuk mereduksi demokrasi substansial menjadi sekedar demokrasi transaksional. Dalam arti demokrasi

¹³ Romli, L. (2008). Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Politika*, 6(1), 7.

¹⁴ Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1-14.

¹⁵ Jemadu, A. (2004). Demokrasi dan Kemakmuran. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).

¹⁶ Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.

¹⁷ Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.

¹⁸ Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362-371.

¹⁹ Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(9).

transaksional disini menyiratkan model demokrasi yang mengandung hubungan timbal balik dengan menganggap pemilih berada dalam bingkai hubungan dagang atau ekonomi.²⁰ Sedangkan demokrasi lokal yang menjadi bagian penting dari proses demokrasi nasional senyatanya tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat, belum isu-isu demokratisasi hanya menjadi jargon retorika dan pencitraan ke rakyat.

Metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif dimana peneliti menggunakan variable penelitian yang peneliti sebutkan sebagai bahan utama dalam menentukan tema yang akan peneliti teliti.²¹ Penelitian kualitatif yang peneliti gunakan juga untuk menghindari bias metodologi, dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini akan ditemukan data-data yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan sehingga dan selanjutnya peneliti akan mengolah data-data tersebut dan melakukan deskripsi untuk menemukan sebuah kebaruan dalam penelitian ini.²² Penelitian secara mendalam juga kan peneliti lakukan untuk itu peneliti juga menggunakan pendekatan ilmu sosial dan ilmu politik dalam penelitian ini karena tema dan pembahasan peneliti focus pada persoalan kepemimpinan partai politik islam dalam konteks politik dan demokrasi. Maka dirasa tepat apabila peneliti menggunakan pendekatan ilmu sosial dan ilmu politik.²³ Variable yang peneliti gunakan juga akan berupa pendekatan ilmu social seperi yang peneliti jelaskan di awal.

Batasan masalah pada penelitian ini yakni ada pada penelitian kepemimpinan partai politik islam dan dalam konteks politik dan dinamika perkembangan demokrasi yang terjadi di kabupaten lamongan. Untuk itu peneliti akan melakukan focus penelitian partai politik yang beraliran islam

²⁰ Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45-53.

²¹ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

²² Mulyadi, S., Basuki, A. H., & Prabowo, H. (2019). *Metode penelitian kualitatif dan mixed method: perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan budaya*.

²³ Donatus, S. K. (2016). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu sosial: Titik kesamaan dan perbedaan. *Studia Philosophica et Theologica*, 16(2), 197-210.

semisal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)²⁴, Partai Amanat Nasional (PAN)²⁵, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)²⁶ dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)²⁷.

PKB bercirikan humanis mereligijs (insaniyah diniyah), menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan, menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.²⁸ Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas

²⁴ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang dekat dengan warga Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejarah kelahirannya tak lepas dari masyarakat dan ulama Nahdliyin. dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-partai-kebangkitan-bangsa-pkb-dari-sejarah-hingga-visi-misi-229mE1FjEHv/1> diakses pada 18/05/2024 pukul 07.30

²⁵ Partai Amanat Nasional adalah partai politik Indonesia yang diketuai oleh Hatta Rajasa. Partai ini berdiri sejak 3 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta dalam <https://www.merdeka.com/partai-amanat-nasional> diakses pada 18/05/2024 pukul 07.35

²⁶ Resmi dibentuk pada 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK. Partai ini didirikan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/09/13563471/profil-pks-sejarah-kelahiran-kepemimpinan-dan-dukungan-ke-anies-muhaimin?page=all> diakses pada 18/05/2024 pukul 07.38

²⁷ Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah pada awal didirikan pada 5 Januari 1973 di Jakarta melalui fusi Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan PERTI. PPP bertujuan untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya, dua partai Islam, yaitu NU dan PSII, pernah bersatu dalam Masyumi yang lahir pada 7 November 1945. Namun, kemudian PSII keluar dari Masyumi pada tahun 1947, dan NU mengikuti jejaknya pada tahun 1952. Setelah pemilu 1955, Masyumi, NU, PSII, dan PERTI kembali bekerja sama dalam Konstituante, khususnya dalam mendukung Islam sebagai dasar negara. Dalam <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-persatuan-pembangunan-ppp/> diakses pada 18/05/2024 pukul 07.40

²⁸ Partai Kebangkitan Bangsa.(2020). Manifesto PKB Melayani Ibu Pertiwi. Tim Kajian Lanskap Indonesia. Hal. 8-9

agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.²⁹

Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Partai Amanat Nasional mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom dan mandiri. Partai ini menginginkan tatanan yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan. Setiap manusia dapat berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan berperan serta dalam usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan.³⁰ Partai Amanat Nasional merupakan partai yang menghormati dan mendorong kemajemukan. Partai ini merupakan kumpulan manusia Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama dan gender. Partai ini menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Kesepakatan peneliti adalah berdasarkan prinsip dasar bersama dan cita-cita politik yang sama.³¹

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai juga berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan, sedangkan selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Partai ini memiliki azas “*Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam*”.³² Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada

²⁹ Ibid Manifesto PKB Melayani Ibu Pertiwi. Tim Kajian Lanskap Indonesia. Hal. 10

³⁰ <https://pan.or.id/prinsip-dasar/> diakses pada 31/05/2024 pukul 20:35

³¹ Ibid

³² <https://pan.or.id/sejarah-pan/> diakses pada 31/05/2024 pukul 20:38

dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.³³ Visi PAN yakni Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.³⁴

Falsafah Dasar Perjuangan PKS adalah pemikiran mendasar tentang nilai-nilai yang diperjuangkan PKS, hasil dari proses objektifikasi nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamiin, dalam memberikan landasan, arah dan tujuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengejawantahan rahmatan lil'alamiin diwujudkan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam meliputi, kasih sayang dan kelembahlembutan, kemoderatan, persatuan dan kebersamaan, budaya ilmu, substansi dan objektifikasi.³⁵ Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).³⁶ PKS adalah Partai berasaskan Islam.³⁷

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.³⁸ Dalam mengawali perjalanan politiknya, organisasi ini membawa ideologi Islam dalam setiap

³³ Ibid

³⁴ <https://pan.or.id/tentang-pan/> diakses pada 31/05/2024 pukul 20:40

³⁵ Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.(2021).Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera,hal. 8-15

³⁶. Bab 2 visi dan misi Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera.(2023). Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera Hal. 3

³⁷ Pasal 2 AD/ART . Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera.(2023). Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera hal 2

³⁸ <https://ppp.or.id/2021/12/06/sejarah-singkat-ppp/> diakses pada 31/05/2024 pukul 21:05

langkah-langkahnya. Dari situ, terbentuklah lima khidmat dan enam prinsip di dalam perjuangan Partai Persatuan Pembangunan ini. Sebagai salah satu partai politik di Indonesia, PPP tentu bergerak mengikuti visi dan misi besar. Hal itulah yang pada akhirnya membawa PPP menuju cita-citanya sejak pertama kali didirikan. Adapun visi besar dari PPP adalah Tercapainya masyarakat yang bertaqwa pada Allah SWT, menciptakan negara yang adil, makmur, serta sejahtera, tegaknya supremasi hukum, serta terciptanya perlindungan HAM.³⁹

Di Lamongan sendiri ketiga partai tersebut yakni PKB, PAN, PKS dan PPP memperoleh kursi yang berbeda satu sama lainnya pada tahun 2019-2024, PKB mendapat 10 kursi sebagai pemenang pemilu legislative pada waktu itu. PAN dapat 7 kursi, PPP 3 kursi dan PKS dengan kursi. Dan partai lainnya mendapat PDIP 8 kursi, Golkar 6 kursi, Gerindra 4 kursi, kemudian NasDem, Perindo dan Hanura masing-masing mendapatkan 1 kursi.⁴⁰ dengan demikian maka partai yang beraliran islam di lamongan yang mampu mendapat kursi di DPRD Lamongan yakni PKS, PAN dan PPP sedangkan PKS mendapat 0 kursi.⁴¹PKB Lamongan mampu mengantarkan calegnya dengan jumlah lebih banyak dan mengungguli partai politik peserta pemilu lainnya. Pada Pemilu legislative pada tahun 2024 PKB berhasil meraih 12 kursi di DPRD. Setelah pada Pemilu 2019 hanya mendapat 10 kursi. Selain PKB, Partai Golkar mendapat 8 kursi, PDIP 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, PAN 5 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai NasDem 3 kurai, PPP 2 kursi hingga Perindo, Partai Ummat dan PKS masing-masing 1 kursi.⁴²

³⁹ <https://ppp.or.id/2022/10/18/partai-persatuan-pembangunan-partainya-umat-islam/> diakses pada 31/05/2024 pukul 21:09

⁴⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4636072/kpu-lamongan-tetapkan-anggota-dewan-terpilih> diakses pada 01/06/2024 pukul 05:12

⁴¹ <https://kabar1lamongan.com/2024/03/05/50-caleg-yang-lolos-menjadi-anggota-dprd-lamongan/> diakses pada 01/06/2024 pukul 05:22

⁴² <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7225369/pkb-raih-12-kursi-di-dprd-lamongan> diakses pada 01/06/2024 pukul 05:22

B. Fokus Penelitian

Dari ulasan dan penjelasan yang peneliti sampaikan di atas maka peneliti membuat fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepemimpinan Partai Politik Islam dalam Konteks Demokrasi di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Kontestasi Partai Politik Islam dalam Konteks Demokrasi di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepemimpinan partai politik islam di Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui dampak dari berkembangnya demokrasi di Kabupaten Lamongan
3. Untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang terjadi akibat dari politik transaksional dan politik identitas di Kabupaten Lamongan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari penelitian ini yakni sebagai berikut?

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi islam dalam konteks demokrasi
2. Memberikan manfaat praksis dan teoritis terhadap studi ilmu politik dan demokrasi di Indonesia
3. Memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah daerah dan masyarakat terhadap untuk pengetahuan tentang realitas politik dan demokrasi daerah.
4. Memberikan manfaat secara akademik bagi para peneliti, dosen, akademisi, mahasiswa dan civitas akademis lainnya terhadap isu-isu terkini tentang politik dan demokrasi daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian yang digunakan sebagai bahan referensi untuk menunjang sebuah penelitian maka penelitian terdahulu punya urgensi dalam penelitian yang akan peneliti bahas, tentu penelitian terdahulu yang peneliti bahas tidak lepas dari fokus kajian dan studi pada kepemimpinan Islam, politik dan demokrasi.⁴³ Yang mana akan berhubungan dengan persoalan politik identitas dan politik transaksional yang selama ini tumbuh dalam dinamika dan konteks demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan.

1. Politik Identitas Islam Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019

Penelitian yang dilakukan oleh Mukayat Al Amin⁴⁴ focus pada penelitian mengenai terjadinya politik identitas dalam pemilu tahun 2019 di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sejarah telah mencatat kontribusi besar dari kedua organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU)⁴⁵ dan Muhammadiyah, dalam pembangunan sumber daya masyarakat desa Paciran. Usaha-usaha yang melibatkan pesantren, sekolah, madrasah, hingga rumah sakit, yang diinisiasi oleh keduanya, semakin memperkuat pengaruh struktur mereka baik yang terikat oleh ruang dan waktu maupun yang tidak. Sejarah panjang keduanya menegaskan bahwa peran historis memiliki dampak besar dalam praktik-praktik politik⁴⁶ identitas. Oleh

⁴³ Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.

⁴⁴ Mukayat, A. A. (2021). Politik Identitas Islam: Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019. Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama, 7(1), 150-169. Dalam <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/21380> diakses pada 21/05/2024 pukul 22.35

⁴⁵ Jamal Ghofir. Biografi Singkat Ulama pejuang Ahlul-sunnah waljama'ah. Jogjakarta: Aura Pustaka. 2012. Halaman 45. Dalam Ummah, S. (2019). Afiliasi Politik Pondok Pesantren Dalam Pilpres 2019 di Kabupaten Lamongan. Jurnal Politik Indonesia Vol, 5(02).

⁴⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. Hal. 172 dalam Mukayat, A. A. (2021). Politik Identitas Islam: Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019. Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama, 7(1), 150-169.

karena itu, sumber daya struktur yang terikat dalam ruang dan waktu, yang selama ini dianggap otoritatif dan alokatif, perlu didekonstruksi.⁴⁷

Peranan sejarah, bersama dengan faktor-faktor lainnya, memegang peran signifikan dalam membentuk kemandirian pilihan politik warga Muhammadiyah Paciran. Dinamika sejarah di desa Paciran Lamongan, yang mencakup identitas dalam berbagai konteks politik dari tingkat lokal hingga nasional, menunjukkan bahwa praktik politik identitas telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, dan intensitasnya terus berkembang dengan berbagai dinamika. Oleh karena itu, praktik politik identitas yang muncul pada Pilpres 2019 tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan kelanjutan dari kontestasi sebelumnya, di mana persaingan dan dominasi pengaruh antara identitas NU dan identitas Muhammadiyah⁴⁸ terus membentuk jurang perbedaan di antara keduanya.⁴⁹

Sejarah panjang pertarungan antar identitas telah terjadi sejak lama di Desa Paciran Lamongan dan perbedaan pilihan identitas tersebut terjadi dari satu kontestasi ke kontestasi yang lain sehingga produksi dan reproduksi praktik politik identitas⁵⁰ terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama oleh karena itu maka historitisa punya peran yang cukup signifikan dalam membangun dan memperkuat praktik politik identitas untuk memengkan calon yang di usung oleh masing-masing identitas. Kedua, pertarungan antar identitas telah terjadi dan akan terus diproduksi oleh para agent dan struktur yang ada dalam masyarakat paciran lamongan

⁴⁷ Mukayat, A. A. (2021). Politik Identitas Islam: Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 7(1), 150-169.

⁴⁸ Rojabi Azharghany, "Konstruksi Sosial Terhadap Kiai Dalam Tradisi Air Doa Dan Amalan." (Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun. 2016) dalam Mukayat, A. A. (2021). Politik Identitas Islam: Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 7(1), 150-169.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ubed Abdillah. Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas (Magelang, Indonesiatera, 2002), hal: 16. Dalam Mukayat, A. A. (2021). Politik Identitas Islam: Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 7(1), 150-169.

untuk memenangkan calon yang dikung dalam berbagai macam kontestasi yang terjadi karena dengan argumentasi kesamaan identitas akan sangat membantu proses mobilisasi pemilih atas nama identitas yang sama.⁵¹

Terjadinya politik identitas di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut memang diwarnai dengan sejarah politik yang cukup Panjang. Identitas politik yang dimaksudkan yakni ada pada terminology NU dan Muhammadiyah. Mukayat (peneliti) mencoba melakukan eksplorasi secara mendalam tentang factor penyebab terjadinya politik identitas yang ada di Kecamatan Paciran, pemisahan golongan antara warga NU dan warga Muhammadiyah secara sosiologis dan politik memang agak kentara maksudnya bahwa dalam penelitian tersebut memang terjadi perbedaan pandangan politik antara Nu dan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Paciran.⁵² Topik penelitian ini yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yakni peran dan perbedaan pilihan politik antara NU dan Muhammadiyah yang kemudian akan menimbulkan politik identitas antara partai politik yang beraliran islam di Kabupaten Lamongan. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang akan peneliti teliti ada pada factor politik dan pilihan politik, begitu juga lokasi penelitian peneliti lebih agak umum karena dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lamongan.

2. Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan Pada Pilpres 2019

Penelitian yang dilakukan Muhammad Harish Fahmi dan Agus Machfud Fauzi⁵³ dilakukan di Kecamatan Solokuro, Kecamatan Laren dan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian terkait dengan perilaku pemilih di daerah tersebut. Tiga kecamatan tersebut memang adalah diantara banyak

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. Paradigma, 9(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/35389> diakses pada 20/05/2024 pukul 20.45 WIB

kecamatan di lamongan yang juga menjadi basis pemilih dengan kategori tertentu.⁵⁴ Ada tiga faktor yang mempengaruhi pilihan subjek. faktor pertama, kuatnya organisasi sosial, tingkat pendidikan dan keluarga. Faktor kedua, keterbukaan informasi publik terkait dengan perkembangan politik di Indonesia serta identifikasi partai yang sampai saat ini masih memberikan pengaruh kuat di masyarakat. Faktor ketiga, pemilih yang memiliki pendidikan tinggi mampu memberikan evaluasi terkait dengan kondisi negara saat ini.⁵⁵

Penelitian tersebut menggaris bawahi ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. seperti faktor sosiologis, psikologis sosial dan rasional.⁵⁶ Berkaitan dengan faktor sosiologis masyarakat memberikan pertimbangan berdasarkan kesamaan organisasi agama yang dianut oleh masing-masing kandidat. Imbalan berupa kaos, pemasangan banner dan sebagainya tidak dapat mempengaruhi pilihan subjek pada kandidat yang dipilihnya. Kinerja yang baik lebih dipilih dari pada latar belakang pendidikan seorang calon kandidat. Faktor psikologis sosial dapat dilihat dari peran media massa,⁵⁷ peran partai politik dan masyarakat sendiri yang turut ikut serta dalam mempromosikan citra kandidat. Perilaku pemilih juga berkaitan dengan faktor pilihan rasional yang menunjukkan bahwa masyarakat dalam menentukan pilihannya mempertimbangkan pengalaman dan melihat proyeksi program selanjutnya.⁵⁸

Dalam penelitian tersebut memang ada sedikit perilaku politik transaksional namun hal tersebut tidak sepenuhnya berupa uang namun

⁵⁴ Ibid Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. Paradigma, 9(1).

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Fauzi, Agus Machfud, Fakri A. Ramlan, Tico Anggoro, and M. Egy AH. 2019. "Sosiologi Keluarga Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula." Dalam Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. Paradigma, 9(1).

⁵⁷ Irmayani, T. 2012. "Perilaku Perempuan Pemilih Dalam Menetapkan Pilihan Pada Pemilu 2009." Jurnal POLITEIA 4(1):12–18. Dalam Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. Paradigma, 9(1).

⁵⁸ Ibid

berupa barang yakni kaos pasangan calon. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa karena beberapa faktor sosiologis pemilih lebih terpengaruh oleh organisasi masyarakat yang mereka ikuti semisal Nahdlatul Ulama⁵⁹ yang dalam beberapa hal dalam penelitian tersebut juga melakukan promosi secara tidak langsung pada salah satu pasangan. Hal demikian menjadi benar adanya karena mayoritas penduduk kabupaten Lamongan adalah warga NU dan Muhammadiyah⁶⁰ hal tersebut juga dibenarkan oleh peneliti dalam penelitian tersebut.

Secara tidak langsung ada sedikit persamaan dengan apa yang peneliti teliti yakni ada pada persoalan politik transaksional yang terjadi pada lokasi penelitian yakni di Kecamatan Solokuro, Laren dan Paciran Kabupaten Lamongan. Terjadi juga politik transaksional dalam hasil penelitian tersebut walaupun tidak secara keseluruhan ada sebagian yang manut dengan ormas dan ada yang sebagian yang masih menggunakan rasionalitas⁶¹ untuk menentukan pilihan. Perbedaan dari tema yang peneliti teliti ada pada persoalan pemilu dan focus bahasan dalam apa yang peneliti teliti. Peneliti focus pada konfigurasi kepemimpinan dari hasil politik dan demokrasi yang ada di kabupaten Lamongan. Sedikit hal beda menjadikan penelitian yang teliti oleh Muhammad Harish Fahmi dan Agus Machfud Fauzi menambah khazanah referensi pada tema penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Lamongan.

3. Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang *Vote Buying* Hijab dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan

Penelitian berikut dilakukan oleh Nova Setya Anggraeni dan Agus Machfud Fauzi⁶² yang membahas tentang politik uang dengan metode vote

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ayu, Retno. 2016. "Perilaku Memilih Masyarakat Muslim Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro." *Politik Muda* 5(2):247–55. Dalam Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). *Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019*. Paradigma

⁶² Fauzi, A. M. (2023). *Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang Vote Buying Hijab dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan*. *Paradigma*, 12(1), 169-178.

buying dengan menggunakan hijab sebagai bahan untuk menarik suara pemilih. Mereka berdua melakukan penelitian di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ada tiga kategori dimana seseorang atau pemilih yang berkaitan dengan politik uang. Pertama yaitu masyarakat menolak adanya praktek politik uang. Kedua masyarakat menerima dan menganggap sah adanya praktek politik uang dan yang ketiga masyarakat acuh terhadap baik ada atau tidaknya praktek politik uang ketika pemilu akan berlangsung.⁶³

Dari penelitian tersebut para peneliti kemudian mengambil beberapa kesimpulan bahwa Yang pertama yaitu masyarakat menganggap adanya politik uang merupakan suatu tindakan yang tidak benar, dan seharusnya menjadi ranah privasi bagi masing-masing individu, kedua masyarakat menganggap jika adanya praktik politik sah-sah saja adanya karena sudah menjadi tradisi dan ketiga masyarakat tidak peduli ada atau tidaknya politik uang karena tidak memiliki dampak yang signifikan pada kehidupannya. Hijab sendiri menurut informan seharusnya tidak menjadi barang untuk pemancing agar mendapatkan hak suara kaum perempuan, atau dianggap baik. karena praktek politik dalam Islam dianggap haram hukumnya, terlebih hijab dianggap suatu hal yang suci bagi umat islam terutama kaum perempuan.⁶⁴

Penggunaan hijab sebagai alat untuk menarik pemilih untuk menentukan pilihan dalam penelitian tersebut ternyata dapat membuat masyarakat di lokasi penelitian atau kecamatan sukodadi kabupaten lamongan mampu untuk menerima pemberian tersebut dan memilih calon yang telah memberikan dia hijab tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melihat hal sederhana namun cukup fokus yakni pada persoalan hijab yang digunakan oleh tim sukses untuk menarik pemilih untuk menentukan suara

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/55862> diakses pada 20/05/2024 pukul 20.30 WIB

⁶³ ibid Fauzi, A. M. (2023). Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang Vote Buying Hijab dalam Pemilu Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan. *Paradigma*, 12(1), 169-178.

⁶⁴ Ibid

nya⁶⁵. Hal ini kemudian menjadi suatu referensi bahwa adanya suatu politik transaksional dengan jenis yang lebih sederhana yakni hijab.⁶⁶ Dalam konteks politik dan demokrasi hal ini bisa jadi masuk dalam kategori politik uang. Hanya saja tidak secara fulgar berbentuk uang untuk menarik pemilih.

Temuan dalam penelitian ini cukup unik dan sederhana, dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa tidak semua warga di lokasi penelitian menerima paket hijab tersebut secara apa adanya. Masih ada juga yang menganggap bahwa hijab tersebut digunakan sebagai alat untuk membeli suara mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu menjadi wajar adanya lantaran ini adalah momen politik. Di sisi lain fenomena tersebut agaknya memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang akan peneliti teliti tentang politik transaksional. Hanya saja dalam penelitian tersebut fokus pada satu bahasan yakni hijab dan hanya berlokasi di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Peneliti juga akan meneliti fenomena yang hampir serupa hanya subjek dan objek penelitian akan lebih luas karena mencakup tema besar yakni konfigurasi kepemimpinan partai politik Islam di Kabupaten Lamongan.

4. Afiliasi Politik Pondok Pesantren dalam Pilpres 2019 Di Kabupaten Lamongan

Penelitian ini dilakukan oleh Shofiatul Ummah⁶⁷ membahas mengenai afiliasi politik pondok pesantren yang ada di kabupaten Lamongan pada pilpres 2019. Ternyata ada peran Lembaga Pendidikan agama yang ikut andil dalam perhelatan politik semacam pilpres. Dalam penelitian ini membahas pengaruh dua pondok besar di kabupaten Lamongan yakni pondok pesantren Sunan Drajad Paciran dan pondok Pesantren Matholiul

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid Fauzi, A. M. (2023). Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang Vote Buying Hijab dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan. *Paradigma*, 12(1), 169-178. Dalam Gunawan, A. (n.d.). *Praktek Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang)* [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁶⁷ Ummah, S. (2019). Afiliasi Politik Pondok Pesantren Dalam Pilpres 2019 di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Politik Indonesia* Vol, 5(02). dalam <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpic38daa356dfull.pdf> diakses pada 20/05/2024 pukul 21.32

Anwar Karanggeneng yang sama-sama berlokasi di Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya memberikan dukungan kepada Prabowo pimpinan pesantren Sunan Drajad yakni KH. Abdul Ghofur dilakukan dengan cara berkampanye melalui kajian-kajian pondok yang disiarkan melalui radio dan Televisi pondok, ikut berkampanye bersama pasangan presiden 02. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pesantren Matholiul Anwar ialah dengan mengajak keluarga besarnya untuk sama-sama memenangkan Jokowi, mengundang KH. Ma'ruf Amin ke yayasan pesantren.⁶⁸

Pemimpin pondok yakni KH. Abdul Ghofur tetap setia memberikan dukungannya untuk pasangan Prabowo - Sandi. Kedekatan KH. Abdul Ghofur terhadap Prabowo menjadi alasan utama mengapa pondok pesantren ini tetap mendukung pasangan 02. Kedekatan Prabowo dengan KH. Abdul Ghofur yang merupakan pemimpin pondok pesantren Sunan Drajad⁶⁹ diawali dari kedekatan KH. Abdul Ghofur dengan Soeharto.⁷⁰ Di dalam tradisi NU, ada istilah “Manut Dawuhe yai” dimana segala keputusan pemimpin pondok akan ditaati dan diikuti secara ikhlas dan penuh oleh santrinya. Alasan inilah yang bisa dikatakan bahwa pondok pesantren Matholiul Anwar merupakan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Kiai Matholiul anwar telah mengakui dukungannya untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf sehingga bisa dibilang semua santrinya juga akan mengikutinya. Yayasan Matholiul Anwar⁷¹ salah satunya adalah

⁶⁸ Ibid ⁶⁸ Ummah, S. (2019). Afiliasi Politik Pondok Pesantren Dalam Pilpres 2019 di Kabupaten Lamongan. Jurnal Politik Indonesia Vol, 5(02).

⁶⁹ Jl. Raden Qosim Banjarny Paciran Lamongan Jawa Timur Indonesia (62264) Selengkapnya bisa akses <https://ppsd.id/category/profil> diakses pada 21/05/2024 pukul 22.05

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Pondok Pesantren “Matholi’ul Anwar” didirikan pada 18 Januari 1914 oleh K.H. Abdul Wahab. Pada masa tersebut belum berwujud pesantren sebagaimana pengertian sekarang yaitu ada Kyai, tempat ibadah, tempat santri dan sarana belajar, namun masih berupa pengajian-pengajian rutin dimana rumah Kiai sebagai tempatnya. K.H. Abdul wahab kembali ke Rahmatullah pada tanggal 12 maret 1925. Setelah Founding father tersebut meninggal dunia, maka pengajian tersebut dilanjutkan oleh putra-putra menantu beliau yaitu K.H. Abdullah, K.H. Rusman dan K.H. Dja’far. Kepengasuhan beliau bertiga tersebut berjalan hingga tahun 1935. Adapun semenjak 17 Juli 1935 kepengasuhan pesantren digantikan oleh K.H. Soefyan Abdul Wahab. Dibawah kepemimpinan K.H. Soefyan Abdul Wahab Pondok Pesantren “Matholi’ul Anwar” mulai berkembang pesat, dimana santri yang mengkaji ilmu di pesantren tersebut tidak hanya dari penduduk sekitar melainkan datang

Universitas Darul Ulum Lamongan⁷², beberapa bulan sebelum pemilihan Ma'ruf Amin mendatangi kampus tersebut untuk meresmikan pembangunan salah satu gedung yang ada di kampus tersebut. Selain itu juga kampus tersebut mengundang Ma'ruf Amin untuk menjadi pembicara di dalam salah satu seminar yang diadakan kampus Unisda Lamongan.⁷³

Dua pondok pesantren tersebut memang termasuk pondok pesantren Nu terbesar di Lamongan.⁷⁴ Dua institusi tersebut melakukan afiliasi politik pada salah satu Pasangan Calon Presiden pada tahun 2019 karena beberapa alasan yang disebutkan oleh peneliti di atas. Memang hal tersebut menjadi suatu polemic tersendiri seperti yang dikatakan Shofiatul Ummah bahwa Dalam hal ini diketahui bahwa afiliasi politik dalam memberikan dukungan pada pilpres tahun ini terjadi karena peranan kiai yang ada di pesantren. Kiai memutuskan terjun dalam politik dengan dua alasan kuat. Pertama, karena faktor keterpanggilan sebagai bagian dari kewajiban seorang muslim untuk memperbaiki sistem sosial. Kedua, karena kebutuhan untuk memperluas jangkauan melalui jejaring di dalam politik.⁷⁵

Alasan yang kemukakan oleh peneliti di atas adalah suatu hal yang wajar dan benar ketika dihubungkan dengan politik, karena seorang Kiai pun punya hak yang sama dengan rakyat bisa untuk menentukan pilihannya. Dalam penelitian tersebut memang fokus pada pembahasan mengenai afiliasi pondok pesantren atau Kiai dalam politik. Hal tersebut juga akan peneliti bahas pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Sejauh ini memang peran Kiai atau Pondok pesantren di Lamongan memang cukup

dari berbagai daerah yang ada di wilayah kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro dan wilayah-wilayah yang lain. Pada saat inilah pesantren tidak hanya menyelenggarakan pendidikan non formal akan tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal (Sekolah umum). Lihat di <https://ppmawar.or.id/index.php/profile/sejarah> diakses pada 21/05/2024 pukul 22.10

⁷² UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN Jln. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan Telp.(0322) 390497 Faks.(0322) 390929 Email : humas@unisda.ac.id dalam <https://unisda.ac.id/> diakses pada 21/05/2024 pukul 21.45.

⁷³ Ibid

⁷⁴ <https://www.nu.or.id/nasional/pesantren-sunan-drajat-satu-satunya-pondok-peninggalan-walisongo-yang-masih-aktif-vA4bM> diakses pada 21/05/2024 pukul 22.45

⁷⁵ Ummah, S. (2019). Afiliasi Politik Pondok Pesantren Dalam Pilpres 2019 di Kabupaten Lamongan. Jurnal Politik Indonesia Vol, 5(02).

signifikan dalam pemilu. hanya saja ada suatu perbedaan pada tema yang akan peneliti teliti yakni pada konfigurasi kepemimpinan partai politik islam yang bertendi pada soal politik dan demokrasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Peneliti juga akan melakukan penelitan yang hamper serupa tentang peran Kiayi dan afiliasi Pondok Pesantren dalam politik. Namun peneliti tidak hanya focus pada tema tersebut karena yang peneliti teliti juga lebih pada peran partai-partai politik beraliran islam yang terlibat dalam pileg di Kabupaten Lamongan.

5. Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal di Indonesia Tahun 2016

Muhtar Haboddin melakukan penelitian dengan judul “Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia” pada tahun 2016.⁷⁶ Penelitian ini berfokus pada proses demokrasi yang terjadi di Indonesia, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kearifan local pada daerah tertentu semisal di Kabupaten Bantaeng (Makasar) Sulawesi Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta pada saat Jokowi-Ahok maju pada pilkada DKI pada saat itu. Penulis focus pada kajian demokrasi, politik dan persoalan budaya politik local yang hari ini memang terjadi di masyarakat ditengah isu perkembangan demokrasi nasional yang luar biasa. Penulis juga menjelaskan bahwa terjadi politik identitas dan politik transaksional dalam demokrasi local yang peneliti sebutkan diawal tadi. Dengan demikian maka ada sedikit kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni terjadi politik identitas dan politik transaksional yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Muhtar Haboddin memberikan penjelasan bahwa Demokrasi menjadi salah pilihan terbaik sebagai sistem politik dan ideologi dunia saat

⁷⁶ Haboddin, M. (2016). *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. Dalam Haboddin, M. (2016https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4oBKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Dinamika+Pilkada+Dan+Demokrasi+Lokal+di+Indonesia+Tahun+2016&ots=GuX6IJngpR&sig=dSybmiOeTjL6cL7kQzOSoMrWi08&redir_esc=y#v=onepage&q=Dinamika%20Pilkada%20Dan%20Demokrasi%20Lokal%20di%20Indonesia%20Tahun%202016&f=false). *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. Diakses pada 19/05/2024 pukul 06:20 WIB

ini. Indonesia sebagai negara berdaulat menjadikan demokrasi sebagai bagian utama dalam sistem politik yang dianutnya. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, kebebasan pers, penerapan nilai-nilai HAM, dan kebebasan untuk memilih dan dipilih menjadi bagian utama dalam roda politik demokrasi.⁷⁷ Selajutnya pada tanggal 9 desember 2015 menjadi moment bersejarah bagi Indonesia karena dilakukan pilkada serentak dan diikuti sebanyak 269 daerah di seluruh Indonesia. Ini menandakan bahwa ada eskalasi politik yang luar biasa di Indonesia.⁷⁸ Mengingat moment bersejarah ini tidak semua negara di dunia mampu melakukan hal tersebut. Disisi lain ada hal yang menjadi dan perlu untuk dikritisi. Sebagai negara demokratis dan menerapkan pemilu sampai di tingkat daerah. Ternyata Indonesia tidak mampu terbebas dengan isu-isu politik semisal politik identitas dan politik transaksional.

Di beberapa daerah hal tersebut jamak terjadi baik di pulau jawa atau bahkan sampai di NTT dan NTB.⁷⁹ Ini menandakan bahwa hal tersebut menjadi suatu gejala yang memang menjadi konsekuensi logis sebuah demokrasi. Tidak hanya itu politik identitas ini menjadi suatu yang terkadang cukup laku untuk dijadikan isu-isu strategis.⁸⁰ Isu-isu tersebut lebih pada persoalan keyakinan dan identitas suatu agama ataupun suku. *Vis a vis* islam dan Kristen misalkan menjadi bahan utama ketika terjadinya pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa memang politik identitas masih menjadi isu strategis yang digunakan pasangan calon untuk mendulang suara.⁸¹

⁷⁷ Haboddin, M. (2016). *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. hal xv-xvii

⁷⁸ Haboddin, M. (2016). *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. hal i-v

⁷⁹ Haboddin, M. (2016). *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. hal 3-5

⁸⁰ Effendi, M. R., & Syafrudin, I. (2020). *Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 12-27.

⁸¹ Lestari, D. (2019). *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia*. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12-16.

Dalam buku yang ditulis Muhtar Haboddin tersebut secara terang menjelaskan bahwa politik identitas dan politik transaksional adalah suatu bagian yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada suatu pergesaran nilai dari idealism menjadi pragmatism politik yang luar biasa, moment seperti pilkada menjadi ajang politik pragmatism atau bahkan jual-beli yang tidak bisa dihindari.⁸²

Penelitian yang dilakukan Muhtar Haboddin memberikan gambaran mengenai pragmtisme politik, transaksional dan politik identitas yang terjadi di Indonesia dengan mengambil salah satu contoh baik di Kota Makasar maupun Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut tentu memberikan suatu tambahan ilmu bagi untuk melakukan penelitian dengan prediksi bahwa demokrasi memberikan konsekuensi berupa terjadinya pragmatism politik berupa politik transaksional dan politik identitas yang sedang berkembang di Indonesia. Perbedaan mendasar dari penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada bentuk atau wujud kepemimpinan islam sendiri dalam meihat dinamika dan perkembangan politik dan demokrasi yang secara khusus terjadi di Kabupaten Lamongan.

6. Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal) Tahun 2018

M. Sirajudin Fikri dan Nico Oktario A melakukan penelitian dengan tema Politik identitas yang selama ini terjadi tidak muncul secara tiba-tiba, identitas menjadi bagian penting dalam demokrasi lokal yang ada di Indonesia tak terkecuali di Palembang.⁸³ Politik identitas menjadi suatu hal lumrah bahkan menjadi kekuatan politik tersendiri yang mampu menjadi mesin politik yang optimal untuk digunakan. Nilai-nilai kultural yang dipeercayai para masyarakat lokal, juga berdampak pada pola pikir elit

⁸² Op.cit Haboddin, M. (2016). Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia. Universitas Brawijaya Press. hal 41-45

⁸³ Fikri, S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 18(2), 167-181. dalam <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/2701> diakses pada 19/05/2024 pukul 06.20.

lokal, beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan ada beberapa kejadian di beberapa daerah yang melihat bahwa penguatan politik Identitas di ranah lokal dapat merubah suatu sistem politik.⁸⁴

Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial yang terbentuk melalui perjalanan sejarah. Budaya politik lokal tersebut terbentuk dari serangkaian kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial yang berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat.⁸⁵ Kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial itulah yang menagaskan pola untuk bertingkah laku masyarakat, mana yang seharusnya dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Batasan-batasan dalam budaya terbut dapat berasal dari agama, adat istiadat ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁸⁶ Budaya politik lokal ini, dapat dilihat pada kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat lokal itu sendiri. Perkembangan budaya politik lokal di Indonesia adalah sebagai reaksi adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat supralokal. Dalam hal ini, budaya politik lokal dipengaruhi oleh sistem kultural dan kepercayaan atau agama.⁸⁷

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam arena pertarungan seperti Indonesia banyak yang saling beradu, berkompetisi mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka yang lapar menjadi tameng akan prinsip kejayaan yang dicoba ditawarkan. Kalangan elit tentu saja memanfaatkan situasu seperti ini dan juga turut dinikmati oleh masyarakat kelas bawah, *money politic* dan korupsi menjadi kendala yang menarik untuk disinggungkan dengan problematika masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yang masih

⁸⁴ Muhtar, Haboddin,. Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Jurnal Pemerintahan Volume 03, Nomor 01 Februari 2012 hal.

⁸⁵ Fikri, M. S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 18(2), 167-181.

⁸⁶ Haryanto. 2015. Politik Kain Timur (Instrumen Meraih Kekuasaan). Yogyakarta:Polgov. Hal 34.37

⁸⁷ Syamsudin, Haris (1994). Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman. Jakarta:LP3Es. hal 36-37

digerakkan oleh uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik. Siapa yang banyak uang dialah yang berhak menang. Tapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu bangsa kedepan.⁸⁸

Demokrasi yang diambil dari kata demos yang berarti masyarakat, dan kratein yang berarti mengatur telah jauh dari kenyataan yang berlaku dipanggung politik yang penuh dengan sandiwara.⁸⁹ maka sebenarnya demokrasi bisa menjadi salah satu nilai ideal dalam sistem politik hari ini. Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi lokal yang hari ini kita ketahui tidak semua berjalan seperti nilai-nilai demokrasi yang banyak disebutkan oleh para pengamat. Pelaksanaan roda pemerintahan tidak selama berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. *Cost politics* yang besar menjadi salah satu penyebab utama dalam tidak lancarnya pelaksanaan roda pemerintahan tak terkecuali di Kota Palembang.⁹⁰

M. Sirajudin Fikri dan Nico Oktario A menjelaskan bahwa unsur politik identitas yang terjadi di Kota Palembang lebih mengdepankan putra daerah sebagai pemimpin politik dan hal tersebut menjadi suatu yang positif karena dari kondisi semacam ini ternyata putra daerah mampu untuk melakukan kompetisi politik daripada pendatang yang budak asli Palembang. Dalam penelitian ini juga disampaikan bahwa orang Palembang lebih memilih putra daerah untuk memimpin daerah mereka baik dalam pilkada dan pileg⁹¹. Hal ini menjadi suatu perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti teliti, walaupun dalam penelitian yang dilakukan M. Sirajudin Fikri dan Nico Oktario A terjadi politik identitas yang bersifat positif, peneliti dalam penelitian yang akan peneliti lakukan akan

⁸⁸ ibid

⁸⁹ Ketchum, Richard M (2004). *Demokrasi Sebuah Pengantar*. Terj. Mukhtasar. Yogyakarta. Niagara hal. 28-29

⁹⁰ Al-Hamdi, R. (2011). *Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Studi Pemerintahan.

⁹¹ Op.cit Fikri, M. S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 18(2), 167-181.

melakukan penelitian yang hamper sama hanya saja focus penelitian peneliti ada pada persoalan demokrasi yang membentuk pola politik transaksional dan politik identitas dengan konfigurasi kepemimpinan partai politik islam yang berhubunagn dengan politik dan demokrasi yang ada di Kabupaten Lamongan.

7. Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasusdi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011

Ridho Al-Hamdi melakukan penelitian dengan tema dan judul Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasusdi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011,⁹² Ridho menjelaskan bahwa Demokrasi lokal mempunyai persoalan yang seharusnya menjadi koreksi bagi kita semua, terutama persoalan kepemimpinan bahkan persoalan orang-orang yang dipimpin (masyarakat itu sendiri).⁹³ Dalam pengamatan yang peneliti lakukan apa yang terjadi di Lampung Tengah menjadi salah satu contoh demokrasi lokal yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan demokrasi kita hari ini. Banyak persoalan yang muncul mulai dari pembangunan jalan yang tidak merata, persoalan distribusi/korupsi BOS (Bantuan Operasional Sekolah), proses pembuatan KTP yang berbelit, sampai pada pendapat weak state yang secara teoritis mampu diterjemahkan pada kondisi Lampung tengah saat ini.⁹⁴

Berpijak pada fungsi pemerintah lokal sebagai pelayan publik, makakasus-kasus yang telah dipaparkan diatas menunjukkan ketidakberdayaannegara lokal dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola dan menyediakan barang-barang politik (*political goods*) kepada masyarakat.⁹⁵Praktek politik transaksional atau

⁹² Al-Hamdi, R. (2011). Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Studi Pemerintahan. dalam <https://jsp.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/225> diakses pada 19/05/2024 pukul 07:15

⁹³ Ibid

⁹⁴ ibid

⁹⁵ Pratikno dan Cornelis Lay (2008). Alternatif Terhadap PerspektifPluralisme: Governability. Makalah untuk Mata Kuliah Politik Indone-iaProgram Pascasarjana Ilmu Politik UGM. Yogyakarta: 25 OktoberProfil Kabupaten Lampung Tengah. (Diakses pada tanggal 9 September2011). <http://regionalinvestment.com/newsipid/displayprofil.php?i-a=1805>

jual-beli suara menjadi suatu persoalan yang tidak mudah diselesaikan terutama di Lampung Tengah. Proporsi transaksi politik terjadi begitu luar biasa. Hal ini terjadi tidak hanya karena karakter kepemimpinan tapi juga persoalan pendidikan politik dan pragmatism politik masyarakat itu sendiri. Tentu hal ini apabila menjalar di hamper seluruh wilayah daerah nusantara maka sebenarnya Indonesia bisa jadi gagal sebagai negara demokrasi.⁹⁶

Cita-cita demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat, pada tataranprakteknya belum bisa dijalankan sesuai dengan harapan. Hambatan-hambatan pun muncul justru dari aktornya, baik dari elit lokal (baik bupatibeserta jajarannya dan DPRD) hingga pejabat tingkat paling bawah, yaituLurah dan Kades. Bahkan masyarakatnya menjadi ikut-ikutan sebagai penghambat bagi lajunya demokrasi lokal. Masyarakat diberikan uang sebagai bagian dari proses kampanye kandidat. Sebaliknya, masyarakatpun berpikir: kandidat pemimpin yang memberi uang banyak, itulah yang dipilih. Pola pikir pragmatis tidak hanya dari atas, tapi dari bawah juga.⁹⁷

Terjadinya pola politik pragmatism dalam demokrasi local yang ada di Kabupetan Lampung Tengah dengan keadaan bahwa kondisi ini seperti terjadi dengan suatu hal yang sengaja dan memang di mengerti oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah lebih pada persoalan transaksi politik yang melibatkan banyak pihak. Tema politik local dan terjadinya politik pragmatis dan transaksional yang terjadi di Kabupaten Lampu tengah⁹⁸ yang diteliti oleg Ridho punya kemiripan dengan tema yang akan peneliti teliti, namun perbedaannya ada pada tema besar terkait tema penelitian yang akan peneliti teliti yakni pada soal konfigurasi kepepimpinan Islam yang dihadapkan pada kontes politik dan demokrasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Yanga dalam sedikit

⁹⁶ Pratikno. 2005. "Good Governance dan Governability". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 8, Nomor 5, Maret: 231-248

⁹⁷ Op.cit Al-Hamdi, R. (2011). Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Studi Pemerintahan.

⁹⁸ Ibid

pembahasan awal terjadi indikasi politik transaksional dan politik identitas di Kabupaten tersebut.

8. Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia Tahun 2016

Ratnia Solihah melakukan penelitian dengan tema politik transaksional pada implikasinya terhadap pemerintahan daerah.⁹⁹ Ratnia menjelaskan bahwa Pesta demokrasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut sering terjadi kasus sengketa mengenai perolehan hasil suara yang melibatkan para pendukung masing-masing calon, yang berujung pada konflik horizontal di banyak daerah, munculnya *money politic* di beberapa lapisan masyarakat maupun lembaga politik dan pemerintahan, serta munculnya beberapa kasus korupsi yang menyeret atau melibatkan banyak kepala daerah di Indonesia yang lahir dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut.¹⁰⁰

Politik transaksional dalam pilkada serentak di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari fenomena adanya barter politik antar partai politik dalam pilkada, munculnya boneka politik yang seolah-olah menjadi lawan politik calon kuat dalam pilkada, adanya biaya politik tinggi yang harus ditanggung oleh partai politik maupun calon yang akan diusulkan oleh partai politik dalam membiayai tahapan kegiatan pilkada dan upaya kemenangan pilkada, serta munculnya *money politics* yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pilkada.¹⁰¹

Untuk membiayai itu semua (mendanai pelbagai biaya aktivitas kampanye, biaya menyewa pakar political marketing, biaya untuk

⁹⁹ Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2(1), 97-109. dalam <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1659> diakses pada 18/05/2024 pukul 06:35 WIB

¹⁰⁰ Djauhari.2011."Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam perspektif Sosiologis)". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. Fitriyah.2012. "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada". Jurnal Politik Vol. 3, No. 1 April 2012

¹⁰¹ Op.cit Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2(1), 97-109.

membangun sarana fisik di kantung-kantung pundi, biaya image building dan image bubbling (pencapaian diri calon) dan banyak lagi), banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Maka dari itu, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai investor politik. Sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (sebagai pelabur/investor politik) dalam memenangkan calon dalam pilkada, maka para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik).¹⁰²

Terjadinya barter politik dan boneka politik yang dilakukan oleh partai politik dalam pilkada menimbulkan kebingungan pemilih, karena koalisi partai politik pendukung pasangan calon tidak jelas, Misalnya pada pemilu gubernur partai A dan partai B berkoalisi dengan partai C dan partai D untuk mengusung calon gubernur, tetapi pada pemilihan bupati/walikota, Partai A berkoalisi dengan partai E,¹⁰³ sehingga pendukung partai A dan partai-partai lainnya dibingungkan oleh pilihan politik partainya. Hal ini merupakan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik yang tidak disadari oleh partai politik. Implikasi lainnya adalah timbulnya apatis masyarakat atau pendukung untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada.¹⁰⁴

Adanya politik biaya tinggi menimbulkan implikasi yang cukup serius bagi pemerintahan yang diselenggarakannya. Logikanya mereka yang berhutang untuk biaya pilkada, akan membalas jasa melalui berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosinya pasca pilkada, dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat luas.¹⁰⁵

¹⁰² Agustino, Leo dan Yusoff, Muhammad Agus. 2010. "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Long Strongmen dan Roving Bandits". Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies. Vol 37 (2010), hal 86-104.

¹⁰³ Fitriyah. 2013. "Perilaku memilih dalam Pilkada kabupaten Kudus 2013". Jurnal Politika Vol. 4 No. 1, April 2013

¹⁰⁴ Op.cit Djauhari. 2011. "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam perspektif Sosiologis)". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. Fitriyah. 2012. "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada". Jurnal Politik Vol. 3, No. 1 April 2012

¹⁰⁵ Op.cit Fitriyah. 2013. "Perilaku memilih dalam Pilkada kabupaten Kudus 2013". Jurnal Politika Vol. 4 No. 1, April 2013

Situasi ini pula belakangan melahirkan perilaku korup kepala daerah guna mengembalikan hutang-hutang semasa pilkada. Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tersebut (menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya mempengaruhi pilihan masyarakat) harus diganti oleh uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada. Selain secara finansial merugikan masyarakat daerah dengan korupsi APBD, praktik politik uang juga mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis.¹⁰⁶

Ratnia menjelaskan bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga politik transaksional berupa *money politics* dan tukar guling kepentingan menjadi hal wajar dan banyak ditemui di Indonesia. Maka unsur-unsur koruptif menjadi warna tersendiri dalam demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan Ratnia tidak disampaikan wilayah Indonesia mana yang mengalami hal tersebut, dia hanya melakukan generalisir dengan data penelitian yang di dapat dari banyak media mass mainstream di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti focus dan spesifik meneliti di Kabupaten Lamongan dengan tema konfigurasi kepemimpinan Islam ditengah adanya isu-isu politik transaksional dan politik identitas dalam konteks politik dan demokrasi.

9. Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo

Bambang Sugiyanto melakukan penelitian tentang kemungkinan terjadinya politik transaksional atau politik uang yang akan terjadi pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo.¹⁰⁷ Perkiraan ini dilihat dari

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Sugiyanto, B. (2020). Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 74-88. Dalam <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/1340> diakses pada 22/05/2024 pukul 05:30

hasil penelitian sebelumnya yakni pada pemilu tahun 2014 dimana banyak terjadi politik uang dalam event demokrasi tersebut. Bambang memberikan penjelasan bahwa Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu praktik perwujudan demokrasi di tingkat lokal. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan pilkada sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Pemilihan seperti ini berfungsi untuk menentukan pemimpin yang kompeten untuk duduk dan menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁰⁸ Namun dalam pelaksanaannya hingga tahun 2019, pilkada telah menuai pro dan kontra di beberapa kalangan, baik praktisi, akademisi, maupun masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya pemborosan anggaran serta janji yang tidak sesuai dengan yang dikampanyekan. Bahkan banyak kepala daerah yang terjerat kasus pelanggaran hukum. Sengketa antar pendukung masing-masing calon atas ketidakpuasan perolehan hasil suara juga berujung pada konflik horizontal di banyak daerah. Hal ini juga ditambah dengan adanya money politics dan kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah di Indonesia.¹⁰⁹

Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa politik transaksional adalah sesuatu yang terbatas namun masyarakat telah memiliki pemahaman yang kuat. Karena efek dari isu-isu transaksional dapat mendorong praktik-praktik politik yang tidak semestinya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dipahami. Persepsi masyarakat di Wonosobo lebih dipengaruhi oleh contoh-contoh praktik politik transaksional. Untuk situasi ini masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap politik mereka terhadap praktik transaksional. ini dipengaruhi biasanya oleh

¹⁰⁸ Sardini, N. H. (2011). Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Fajar Media Press. Hal. 298 dalam Sugiyanto, B. (2020). Praktik Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 74-88

¹⁰⁹ Djauhari, H. (2011). Problematika Kepala Daerah secara langsung (dalam Perspektif Sosiologis). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 25–35. Dalam Sugiyanto, B. (2020). Praktik Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 74-88

kondisi keuangan masyarakat Wonosobo. Individu semakin realistis dalam menentukan dukungan mereka.¹¹⁰

Pemahaman dan penilaian pragmatis telah mengakar di kehidupan masyarakat Wonosobo. Saat mereka mendapatkan bayaran langsung dari calon legislative, dalam hal ini menjelang pemilu 2019, mereka berpikir untuk mengambil keuntungan. Menyadari akan lemahnya pendirian masyarakat yang dapat dimobilisasi dengan uang ini, para elit politik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional telah memanfaatkan mereka.¹¹¹ Contoh paling nyata politik transaksional menjelang pemilu 2019 Wonosobo adalah dengan adanya upaya caleg memberikan pasokan sembako, uang, serta pembangunan fasilitas public. Kejadian yang terjadi di kabupaten wonosobo tersebut tentu tidak terjadi dalam ruang hampa, Bambang juga menjelaskan bahwa adanya suatu kebiasaan dari masyarakat yang membuat hal tersebut marak terjadi.¹¹²

Penelitian yang dilakukan Bambang Sugiyanto focus pada penelitian Tindakan politik transaksional yang dilakukan oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Wonosobo dan dari hasil penelitian tersebut marak terjadi politik transaksional berupa memberikan pasokan sembako, uang, serta pembangunan fasilitas public.¹¹³ Hal yang hamper serupa juga akan peneliti lakukan pada penelitian yang akan peneliti teliti, peneliti juga akan meneliti politik transaksional yang terjadi di kabupaten lamongan. Hanya saja politik transaksional adalah salah satu dari variable penelitian dari tema penelitian yang akan peneliti bahas. Lebih lanjut peneliti akan melakukan pemotretan konfigurasi kepemimpinan islam di Kabupaten Lamongan yang berkenaan dengan isu-isu politik dan demokrasi.

¹¹⁰ Ibid Sugiyanto, B. (2020). Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 74-88

¹¹¹ Ibid

¹¹² Ibid

¹¹³ Ibid

10. Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Sudirman L melakukan penelitian dengan tema politik transaksional yang berhubungan dengan tema hukum islam di Indonesia¹¹⁴ dalam penelitian tersebut ditemukan atau dibahas bahwa Era liberalisasi politik dalam wajah demokrasi Indonesia membawa konsekuensi politik berbiaya tinggi. Ini terlihat dari besarnya dana kampanye untuk menduduki satu kursi di gedung dewan. Para caleg juga harus merogoh ‘kocek’ lebih dalam lagi dengan mulai massifnya pragmatisme masyarakat dalam memilih calon. Ungkapan “ada uang, ada barang” atau “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” menunjukkan pola-pola politik transaksional mulai menyusup dalam ruang-ruang pesta demokrasi. Hal ini juga bukan kesalahan rakyat semata, perilaku elit politik yang membiasakan mereduksi person (pemilih) hanya sebagai mahluk ekonomi semata, kemudian mengkonstruksi bangunan politik transaksional yang buruk di tengah belum meleknya masyarakat terhadap politik.¹¹⁵

Perilaku politik transaksional yang terjadi saat ini berlaku definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang atau sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama, dengan cara apa pun. Cara-cara yang digunakan bisa berupa bujukan, paksaan atau mengonstruksi insentif pada pihak kedua. Tawar menawar politik dapat berupa ancaman hukuman, dapat juga berupa tawaran yang menguntungkan. Basis kekuasaan pihak pertama untuk memengaruhi pihak kedua bermacam-macam, dapat berupa uang, jabatan politik maupun penguasaan informasi negatif mengenai pihak kedua.¹¹⁶ Sedangkan dalam Islam menganjurkan bahwa pililah pemimpin

¹¹⁴ Sudirman, L. (2012). Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 10(1), 99-110. dalam <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/258> diakses pada 22/05/2024 pukul 06:05 WIB

¹¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 893 dalam Sudirman, L. (2012). Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 10(1), 99-110

¹¹⁶ Ibid

yang baik , beriman dan mampu berbuat adil. Hal ini tentu menjadi suatu dilemma problematis tersendiri dengan kata lain bahwa kondisi demokrasi hari lebih pada persoalan transaksi antar pelaku politik dan objek dalam politik yakni dalam moment politik baik pilkada maupun pileg.¹¹⁷

Dengan kondisi politik demokrasi yang serba transaksional dan banyak terjadi di Indonesia maka tema seperti ini punya kemiripan dengan apa yang akan peneliti teliti bahwa demokrasi menghasilkan Tindakan politik transaksional yang tidak bisa dihindari. Dengan maksud bahwa memang demokrasi memberikan beban keuangan yang tinggi bagi para kandidat. Hal ini juag diperparah dengan sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kondisi tersebut.¹¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya melihat atau menganalisis persoalan demokrasi yang kemudian menghasilkan politik transaksional tapi juga mendekatkan pada persoalan politik identitas yang terjadi di beberapa daerah seperti yang peneliti banyak singgung sebelumnya. Hal ini yang kemudian menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dengan tema yang akan peneliti teliti.

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Hakim, A. B., & Muhyidin, M. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). JOSH: Journal of Sharia, 1(01), 12-22.

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan	Kesimpulan
1	Politik Identitas Islam Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019	Mukayat Al Amin	2019	Terjadinya politik identitas di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut memang diwarnai dengan sejarah politik yang cukup Panjang. Identitas politik yang dimaksudkan yakni ada pada terminology NU dan Muhammadiyah. Mukayat (peneliti) mencoba melakukan eksplorasi secara mendalam tentang factor penyebab terjadinya politik identitas yang ada di Kecamatan Paciran, pemisahan golongan antara warga NU dan warga Muhammadiyah secara sosiologis dan politik memang agak kentara maskudnya bahwa dalam penelitian tersebut memang terjadi perbedaan pandangan politik antara Nu dan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Paciran	Topik penelitian ini yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yakni peran dan perbedaan pilihan politik antara NU dan Muhammadiyah yang kemudian akan menimbulkan politik identitas antara partai politik yang beraliran islam di Kabupaten Lamongan. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang akan peneliti teliti ada pada factor politik dan pilihan politik, begitu juga lokasi penelitian peneliti lebih agak umum karena dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lamongan.
2	Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan Pada Pilpres 2019	Harish Fahmi dan Agus Machfud Fauzi	2019	Ada tiga faktor yang mempengaruhi pilihan subjek. faktor pertama, kuatnya organisasi sosial, tingkat pendidikan dan keluarga. Faktor kedua, keterbukaan informasi publik terkait dengan perkembangan politik di Indonesia serta identifikasi partai yang sampai saat ini masih memberikan pengaruh kuat di masyarakat. Faktor ketiga, pemilih yang memiliki pendidikan tinggi	Terjadi juga politik transaksional dalam hasil penelitian tersebut walaupun tidak secara keseluruhan ada sebagian yang manut dengan ormas dan ada yang sebagian yang masih menggunakan rasionalitas untuk menentukan

				mampu memberikan evaluasi terkait dengan kondisi negara saat ini	
3	Konstruksi Masyarakat tentang Praktik Politik Uang <i>Vote Buying</i> Hijab dalam Pemilukada Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lamongan	Nova Setya Anggraeni dan Agus Machfud Fauzi	2020	Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ada tiga katerogi dimana seseorang atau pemilih yang berkaitan dengan politik uang. Pertama yaitu masyarakat menolak adanya praktek politik uang. Kedua masyarakat menerima dan menganggap sah adanya praktek politik uang dan yang ketiga masyarakat acuh terhadap baik ada atau tidaknya praktek politik uang ketika pemilukada berlangsung	Pertama yaitu masyarakat menganggap adanya politik uang merupakan suatu tindakan yang tidak benar, dan seharusnya menjadi ranah privasi bagi masing-masing individu, kedua masyarakat menganggap jika adanya praktik politik sah-sah saja adanya karena sudah menjadi tradisi dan ketiga masyarakat tidak peduli ada atau tidaknya politik uang karena tidak memiliki dampak yang signifikan pada kehidupannya
4	Afiliasi Politik Pondok Pesantren dalam Pilpres 2019 Di Kabupaten Lamongan	Shofiatul Ummah	2019	Pengaruh dua pondok besar di kabupaten lamongan yakni pondok pesantren Sunan Drajad Paciran dan pondok Pesantren Matholiul Anwar Karanggeneng yang sama-sama berlokasi di Kabupaten Lamongan.	Upaya memberikan dukungan kepada Prabowo pimpinan pesantren Sunan Drajad yakni KH. Abdul Ghofur dilakukan dengan cara berkampanye melalui kajian-kajian pondok yang disiarkan melalui radio dan Televisi pondok. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pesantren Matholiul Anwar ialah dengan mengajak keluarga besarnya untk sama-sama memenangkan Jokowi, mengundang KH. Ma'ruf
5	Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal di Indonesia Tahun 2016	Muhtar Haboddin	2016	Politik identitas dan politik transaksional adalah suatu bagian yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada suatu pergeseran nilai dari idealism menjadi pragmatism politik yang luar biasa, moment	1.Pragmtisme politik, transaksional dan politik identitas yang terjadi di Indonesia dengan mengambil salah satu contoh baik di Kota Makasar maupun Nusa Tenggara Timur.

				seperti pilkada menjadi ajang politik pragmatism atau bahkan jual-beli yang tidak bisa dihindari	2.Demokrasi memberikan konsekuensi berupa terjadinya pragmatism politik berupa politik transaksional dan politik identitas yang sedang berkembang di Indonesia.
6	Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal) Tahun 2018	M. Sirajudin Fikri dan Nico Oktario A	2018	Politik identitas menjadi suatu hal lumrah bahkan menjadi kekuatan politik tersendiri yang mampu menjadi mesin politik yang optimal untuk digunakan	1. Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial yang terbentuk melalui perjalanan sejarah. Budaya politik lokal tersebut terbentuk dari serangkaian kepercayaan, kebiasaan, dan struktur soial yang berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat 2.Politik identitas yang terjadi di Kota Palembang lebih mengedepankan putra daerah sebagai pemimpin politik
7	Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasusdi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011	Ridho Al-Hamdi	2011	Praktek politik transaksional atau jual-beli suara menjadi suatu persoalan yang tidak mudah diselesaikan terutama di Lampung Tengah. Proporsi transaksi politik terjadi begitu luar biasa. Hal ini terjadi tidak hanya karena karakter kepemimpinan tapi juga persoalan pendidikan politik dan pragmatism politik masyarakat itu sendiri	Terjadinya pola politik pragmatism dalam demokrasi local yang ada di Kabupetan Lampung Tengah dengan keadaan bahwa kondisi ini seperti terjadi dengan suatu hal yang sengaja dan memang di mengerti oleh masyarakat itu sendiri
8	Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia Tahun 2016	Ratnia Solihah	2016	adanya biaya politik tinggi yang harus ditanggung oleh partai politik maupun calon yang akan diusulkan oleh partai politik dalam membiayai tahapan kegiatan pilkada dan upaya pemenangan pilkada, serta munculnya <i>money politics</i> yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pilkada.	1.Demokrasi yang terjadi di Indonesia memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga politik transaksional berupa <i>money politics</i> dan tukar guling kepentingan menjadi hal wajar dan banyak ditemui di Indonesia.

					2.Maka unsur-unsur koruptif menjadi warna tersendiri dalam demokrasi yang terjadi di Indonesia
9	Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo	Bambang Sugiyanto	2019	Politik transaksional adalah sesuatu yang terbatas namun masyarakat telah memiliki pemahaman yang kuat. Karena efek dari lisu-isu transaksional dapat mendorong praktik-praktik politik yang tidak semestinya. Dalam halini ada beberapa hal yang bisa dipahami. Persepsi masyarakat di Wonosobo lebih dipengaruhi oleh contoh-contoh praktek politik transaksional	1.Tindakan politik transaksional yang dilakukan oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Wonosobo dan dari hasil penelitian tersebut marak terjadi politik transaksional berupa memberikan pasokan sembako, uang, serta pembangunan fasilitas public. 2.Adanya suatu kebiasaan dari masyarakat yang membuat hal tersebut marak terjadi
10	Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia	Sudirman L	2012	Era liberalisasi politik dalam wajah demokrasi Indonesia membawa konsekuensi politik berbiaya tinggi	1.Para caleg juga harus merogoh ‘kocek’ lebih dalam lagi dengan mulai massifnya pragmatisme masyarakat dalam memilih calon. Ungkapan “ada uang, ada barang” atau “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” menunjukkan pola-pola politik transaksional mulai menyusup dalam ruang-ruang pesta demokrasi 2.Perilaku politik transaksional yang terjadi saat ini berlaku definisi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang atau sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama, dengan cara apa pun

F. Definisi Istilah / Operasional

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan¹¹⁹ lekat hubungan dengan suatu cara atau manajemen dalam memimpin, mengendalikan serta mengatur suatu komunitas, organisasi bahwa suatu pemerintahan. Sebuah organisasi tentu sangat membutuhkan kepemimpinan yang efektif, efisien, transformative, transparan dan juga akuntabel.¹²⁰ Dengan demikian hal ini menjadi penting adanya mengingat sebuah pemimpin atau kepemimpinan ibarat kepala ikan yang akan beriringan dengan badan dan ekor sebagai bagian satu organisasi. Secara umum seseorang bisa punya jiwa kepemimpinan yang baik karena beberapa factor yakni biologis dan ideologis.¹²¹ Maksudnya bahwa bisa jadi seorang tersebut memang secara genetic punya jiwa kepemimpinan yang kuat yang diwarisi oleh keluarga dan nenek moyang. Ada juga yang secara ideologis maksudnya dia melakukan beberapa ketrampilan dan mengasah kemampuan kepemimpinannya dalam sebuah organisasi.¹²²

Ada juga kepemimpin yang timbul dari dua acara tersebut yakni campuran antara biologis maupun ideologis, sehingga akan muncul suatu jiwa kepemimpinan yang bagus yang memang dibutuhkan sesuai zamannya.¹²³ Islam sendiri sudah mengenal konsep kepemimpinan sejak lama, namun pada masa Nabi Muhammad¹²⁴ hal tersebut lebih kentara dan menjadi role model kepemimpinan seluruh umat muslim di dunia. Nabi Muhammad saw, punya empat sifat kepemimpinan yang memang

¹¹⁹ Syahril, S. (2019). Teori-teori kepemimpinan. Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 4(02), 208-215.

¹²⁰ Handoko, H., & Tjiptono, F. (1996). Kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 11(1).

¹²¹ Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia.

¹²² Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK), 1(1), 1-12.

¹²³ Qadaruddin, M. (2016). Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi. Deepublish. Hal. 45-46

¹²⁴ Olifiansyah, M., Hidayat, W., Dianying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam, 14(1), 98-111.

ideal digunakan sepanjang masa. Ada Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fatanah (cerdas serta bijaksana), Shiddiq (jujur dan benar).¹²⁵ Dengan empat konsep sederhana tersebut umat islam menyakini bahwa model kepemimpinan yang dilakukan oleh nabi Muhammad ialah yang paling ideal dan memang sudah sesuai dengan sunnahNya.¹²⁶

Begitupun model kepemimpinan yang dicontohkan oleh Khulafauryisidin yang berkembang pasca wafat Nabi Muhammad empat sahabat nabi tersebut Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib¹²⁷. Mereka memberikan contoh untuk menjadi role model yang bisa dijadikan acuan untuk memimpin bagi umat islam. Maka hal-hal sederhana akan dapat kita temui apabila menilik skilas sejarah Khulafauryisidin.¹²⁸ Empat sahabat nabi tersebut memberi pelengkap untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik dengan tetap juga menggunakan empat konsep yang peneliti sebutkan sebelumnya.¹²⁹

2. Demokrasi

Sistem dan ideologi politik yang paling berkembang pada tiga decade terakhir yakni demokrasi. Konsep politik tersebut menjadi role model bernegara yang paling banyak digunakan oleh mayoritas negara didunia. Demos dan kratos adalah suatu terminologi bahasa yang menjadi konsep utama demokrasi yang berarti Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak.¹³⁰ Yakni suatu konsep dimana

¹²⁵ <https://fkmpsfik.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/554/rasulullah-sebagai-pemimpin-dan-relevansinya-dengan-kepemimpinan> diakses pada tanggal 12 Februari 2024 pukul. 19.00

¹²⁶ Wijokongko, D., & Al-Hafizd, M. F. (2020). Kategori kepemimpinan dalam Islam. Jurnal Edukasi Nonformal, 1(1), 171-189.

¹²⁷ Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin al-Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib). Yasin, 1(2), 262-274.

¹²⁸ Zainudin, E. (2015). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1).

¹²⁹ El-Basyiry, A. M. (2022). Meneladani Kepemimpinan Khalifah: Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan. Amzah.hal.35-37

¹³⁰ Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 413-422.

rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah sistem politik.¹³¹

Demokrasi mulai berkembang pasca berakhirnya perang dunia II, banyak negara yang merdeka yang saat perang tersebut berakhir termasuk Indonesia. Amerika Serikat setelah perang dunia II menyatakan sebagai negara demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet mendiklaim diri mereka sebagai negara komunis. Sejak saat itu maka dimulailah perang dingin.¹³² Dengan kekuatan yang hampir setara baik secara ekonomi, politik, sosial dan militer kedua negara tersebut beradu untuk menjadi nomor 1 di dunia. Tak heran apabila pada masa perang dingin dunia terbagi menjadi dua poros yakni poros barat (Amerika Serikat) dan poros timur (Uni Soviet).¹³³ Sehingga pilihan logis banyak negara di dunia saat itu kalau tidak masuk poros barat adalah poros timur atau bisa juga disebut dalam istilah blok. Indonesia pada saat itu (setelah merdeka) mencoba untuk memilih blok atau poros alternatif yakni dengan menggagas Gerakan negara non-blok.¹³⁴ Namun Indonesia tetap ada kecenderungan yakni ada para poros timur (Uni Soviet).¹³⁵

Perang Dingin berakhir pada akhir tahun 80 dan awal 90 yakni dengan bubarnya Uni Soviet yang menjadi negara Rusia, runtuhnya tembok Berlin di Jerman yang kemudian menyatukan Jerman Barat dan Timur.¹³⁶ Setelah kejadian besar tersebut demokrasi kemudian menjelma menjadi ideologi dan sistem politik mainstream yang banyak dianut

¹³¹ Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115-126.

¹³² Laksana, H. (2018). *Pembangunan Politik Negara Jepang Pasca Perang Dunia II* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

¹³³ Yan, R. H. (2016). Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).

¹³⁴ Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 13-28.

¹³⁵ Bakry, U. S. (2017). Perspektif Rusia tentang Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 75-89.

¹³⁶ Murtamadji, M. (2008). *Gagalnya Perang Antara Amerika Dan Unisoviet (P D. Iii) Di Era Perang Dingin Sekalipun Kedua Negara Adidaya Saling Bersaing Persenjataan Dan Terlibat Dalam Berbagai Konflik Regional Di Belahan Bumi*. *Humanika*, 8(1).

oleh negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak lama (pasca merdeka) Indonesia sudah melaksanakan demokrasi namun tidak secara prinsipil dan konseptual barulah pada tahun 1998 terjadi refromasi dan runtuhnya rezim orde baru Indonesia mulai melukan transisi dan transfomasi skala besar pada demokrasi.¹³⁷

Setelah Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 yang menjadi babak baru arah politik dan demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi negara muslim terbesar dunia yang mampu menerapkan demokrasi secara prosedur degan baik.¹³⁸ Namun hal tersebut juga beringingan dengan gejala korupsi¹³⁹ yang naik juga. Hal ini ditengarai oleh para ahli kebijakan dan politik bahwa biaya politik yang tinggi di Indonesia menjadi salah satu factor terjadinya korupsi yang bersifat tersruktur, sistematis dan massif. Tentu hal tersebut sebernarnya cukup disayangkan karena Indeks demokrasi Indonesia yang sudah tinggi ternyata dibarengi dengan indeks korupsi yang tinggi juga.¹⁴⁰

Perkembangan politik dan demokrasi di daerah juga menjadi sajian isu yang penting untuk dilakukan telisik. Demokrasi daerah atau local menjadi suatu cerminan politik nasional yang memang satu rangkaian walaupun secara praktis terkadang visinya berbeda.¹⁴¹ Perkembangan dan dinamika politik demokrasi daerah mulai hangat dibicarakan setelah adanya pemilu tingkat daerah atau dikenal dengan Pilkada¹⁴² (Pemilihan Kepala Daerah) sejak tahun 2005. Hal yang hamper serupa juga terjadi

¹³⁷ Cipto, B. (2002). Dinamika Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin Dan Implikasinya Terhadap Peran Umat Islam Di Indonesia. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 3(1), 17-28.

¹³⁸ Fatwa, A. M. (2004). Melanjutkan reformasi membangun demokrasi: jejak langkah parlemen Indonesia periode 1999-2004.

¹³⁹ Nugroho, S. B. M. (2016). Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. *Media ekonomi dan manajemen*, 26(2).

¹⁴⁰ Rahmatulloh, R. (2019). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 112-145.

¹⁴¹ Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).

¹⁴² Ibadurrahman, I. (2021). Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah. *Lex Renaissance*, 6(4), 770-780.

di tingkat daerah yang mana banyak korupsi yang melibatkan kepala daerah yang secara terpaksa harus berurusan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).¹⁴³ Demokrasi daerah menyajikan suatu hal yang memang unik karena kearifan local menjadi daya Tarik dan memang hal ini berbeda kondisi yang berbeda antar daerah.¹⁴⁴

¹⁴³ Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).

¹⁴⁴ Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44-58.